

**PERAN PEMERINTAH  
DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN  
DESA**

Oleh :

**Cecep Samsu Hidayat<sup>a</sup> – Arif Nugroho<sup>b</sup>**

Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

E mail : <sup>a</sup>cepsamsu82@gmail.com, <sup>b</sup>ariyul88@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Pemerintah desa merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui berbagai program pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat desa dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran irigasi, dan fasilitas umum yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga menjalankan berbagai program sosial dan pemberdayaan ekonomi, seperti penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), pembentukan kelompok usaha masyarakat, serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Kesimpulannya, peran pemerintah desa sangat penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif serta mengurangi tingkat kemiskinan. Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sinergi antar lembaga, dan partisipasi aktif masyarakat agar tujuan pembangunan dan pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara optimal.

**Kata kunci:** Peran Pemerintah, Pembangunan Desa, Pengentasan Kemiskinan, desa, pemberdayaan masyarakat

**ABSTRACT**

*This research aims to explore and analyze the role of the government in village development and poverty alleviation. The village government serves as the frontline executor of development programs intended to improve community welfare, particularly through initiatives targeting poverty reduction. This study employs a descriptive qualitative method, using interviews, observations, and documentation involving village officials and local residents.*

*The findings reveal that the village government plays an active role in developing essential infrastructure such as roads, irrigation channels, and public facilities that support local economic*

# **SEMINASIA**

## **(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)**

**“Membangun Bangsa Melalui Pembangunan Ekonomi Perdesaan”**

*activities. In addition, the government implements various social and economic empowerment programs, including the distribution of direct cash assistance (BLT), establishment of community business groups, and the development of Village-Owned Enterprises (BUMDes). However, the implementation still faces challenges such as limited human resources and low community participation.*

*In conclusion, the village government plays a crucial role in promoting inclusive development and reducing poverty levels. Improving the capacity of local officials, strengthening inter-institutional collaboration, and encouraging community participation are essential to achieving sustainable development and effective poverty alleviation.*

**Keywords:** government role, village development, poverty alleviation, empowerment, rural community

## **LATAR BELAKANG**

Kemiskinan di pedesaan masih menjadi salah satu permasalahan mendasar di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, angka kemiskinan di desa cenderung lebih tinggi dibandingkan di wilayah perkotaan. Menurut BPS, kemiskinan adalah ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur dari garis kemiskinan. Kemiskinan terbagi dalam dua kategori, yaitu Kemiskinan Absolut dan Kemiskinan Relatif. Kemiskinan absolut yaitu Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sementara Kemiskinan Relatif, yaitu kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk hidup sesuai standar hidup yang berlaku dalam masyarakat tertentu. (Townsend, 1979). Sementara menurut (Lewis, 1961), kemiskinan merupakan akibat dari struktur ekonomi dan sosial yang tidak adil.

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi ketimpangan, serta mempercepat pengentasan kemiskinan.

Pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun desa, memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan desa melalui berbagai program seperti Dana Desa, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan program pembangunan berbasis komunitas lainnya. Melalui regulasi, pengalokasian anggaran, serta pembinaan kapasitas, pemerintah bertugas memastikan bahwa pembangunan desa berjalan efektif, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas peran pemerintah dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan di desa masih menghadapi banyak tantangan. Kurangnya koordinasi antar lembaga, kapasitas aparatur desa yang belum optimal, rendahnya partisipasi masyarakat, serta masalah transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi faktor-faktor yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa.

Sampai saat ini, pemerintah banyak mengeluarkan program untuk mengentaskan kemiskinan, namun program tersebut dirasa tidak terlalu berpengaruh untuk menyelesaikan dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

# SEMINASIA

(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

“Membangun Bangsa Melalui Pembangunan Ekonomi Perdesaan”

Berdasarkan data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), data Kemiskinan Nasional (Indonesia) – September 2024 menunjukkan persentase penduduk miskin: 8,57% sementara jumlah penduduk miskin: 24,78 juta orang, dengan Garis Kemiskinan: Rp595.242 per kapita per bulan. Sementara menurut BPS DKI Jakarta, menunjukkan Garis Kemiskinan per rumah tangga: Rp2.803.590 per rumah tangga per bulan . Kemiskinan di DKI Jakarta – Maret 2024, Persentase penduduk miskin: 4,30% dengan jumlah penduduk miskin: 464.930 orang, Garis Kemiskinan: Rp825.288 per kapita per bulan.

Sementara data kemiskinan di Provinsi Banten – September 2024, menunjukkan Persentase penduduk miskin: 5,70% dengan Jumlah penduduk miskin: 791.610 orang, Garis Kemiskinan: Rp667.403 per kapita per bulan. Sedangkan data kemiskinan untuk Kabupaten Pandeglang – Maret 2024, dengan Persentase penduduk miskin: 9,18%, Jumlah penduduk miskin: 113.450 orang. Penurunan dari tahun sebelumnya: 0,09% (dari 9,27% pada 2023). Angka kemiskinan ekstrem: Turun dari 1,34% (2023) menjadi 0,78% (2024) ([radarbanten.co.id](http://radarbanten.co.id))

Data ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang, persentasenya masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Banten. Hal ini menandakan perlunya perhatian khusus dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.

Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional, serta percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan

pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2000). Namun demikian, program pembangunan sering kali dirancang tanpa melibatkan masyarakat desa secara aktif, sehingga kebutuhan riil warga kurang terakomodasi dan partisipasi dalam pelaksanaan juga rendah. Alokasi anggaran pembangunan, termasuk Dana Desa, kadang tidak tepat sasaran, bahkan terjadi penyimpangan atau korupsi, yang mengurangi efektivitas program pengentasan kemiskinan. Koordinasi antar lembaga yang lemah, antara pemerintah pusat, daerah, dan desa sering terjadi tumpang tindih program, kurang sinkronisasi kebijakan, dan lemahnya koordinasi, sehingga menimbulkan kebingungan dan inefisiensi.

Keterbatasan infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan menghambat perkembangan ekonomi desa dan memperlambat upaya pengentasan kemiskinan. Banyak program pembangunan masih berorientasi dari atas ke bawah (top-down), bukan berdasarkan inisiatif dan kebutuhan masyarakat desa sendiri, sehingga tingkat keberhasilannya rendah. Beberapa desa menjadi terlalu bergantung pada bantuan pemerintah tanpa mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat, seperti pengembangan usaha mikro, pertanian produktif, dan koperasi desa.

Pelaksanaan program pembangunan desa sering tidak diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang konsisten dan profesional, sehingga masalah tidak segera teridentifikasi dan diperbaiki. Sering terjadi perubahan regulasi atau kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah yang tidak konsisten, membingungkan pemerintah desa dalam menjalankan program-program pembangunan. Program pengentasan kemiskinan kadang hanya

# SEMINASIA

(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

"Membangun Bangsa Melalui Pembangunan Ekonomi Perdesaan"

menguntungkan kelompok tertentu, sehingga memperparah kesenjangan antar warga di dalam desa itu sendiri.

Pemberdayaan merupakan proses strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi individu maupun kelompok dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Menurut (Chambers, 1995), pemberdayaan adalah suatu proses yang memungkinkan masyarakat untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri, meningkatkan kapasitas, dan mengatasi kemiskinan. Program pembangunan dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya keputusan elit atau pemerintah pusat. Program pembangunan desa yang efektif harus berorientasi pada pemberdayaan, bukan sekadar pemberian bantuan.

Sementara (Rostow, 1960), mengemukakan Tahapan Pertumbuhan Ekonomi yang terdiri dari: *Traditional Society, Preconditions for Take-Off, Take-Off, Drive to Maturity* dan *Age of High Mass Consumption*. Teori ini menjelaskan pentingnya pembangunan desa sebagai tahap awal dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dengan pemerintah sebagai pendorong transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern.

Dalam setiap proses pembangunan atau pemberdayaan, partisipasi aktif masyarakat tidak hanya memperkuat keberhasilan program, tetapi juga mencerminkan pendekatan penelitian yang partisipatif dan berkelanjutan. (Arnstein, 1969), mengukur sejauh mana masyarakat desa terlibat aktif dalam proses pembangunan dan pengentasan

kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana keterlibatan pemerintah dalam mendukung pembangunan desa, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program-program pembangunan, serta untuk memberikan rekomendasi dalam upaya meningkatkan efektivitas peran pemerintah dalam membangun desa dan mengurangi kemiskinan.

Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui :

- a. Menganalisis peran pemerintah dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan desa dan program pengentasan kemiskinan.
- c. Menilai efektivitas program-program pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di desa.
- d. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mendukung pembangunan desa dan upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

## PEMBAHASAN

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, ditemukan bahwa pemerintah desa telah berupaya mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, saluran irigasi, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan.

# SEMINASIA

(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

"Membangun Bangsa Melalui Pembangunan Ekonomi Perdesaan"

Program-program pembangunan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga sebagai fondasi dalam mendukung kegiatan ekonomi warga. Misalnya, perbaikan jalan desa memudahkan akses transportasi hasil pertanian ke pasar, sehingga berpengaruh pada peningkatan pendapatan petani. Pemerintah juga melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa (musdes) untuk menentukan prioritas pembangunan, sehingga hasil pembangunan lebih tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan sebagai fasilitator sekaligus pelaksana program pembangunan secara partisipatif.

Pengentasan kemiskinan merupakan bagian integral dari tujuan pembangunan desa. Pemerintah desa, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pusat, telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Program yang paling menonjol adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, program keluarga harapan (PKH), serta pelatihan usaha mikro melalui program pemberdayaan. Tujuan dari program-program ini tidak hanya untuk memberi bantuan sementara, tetapi juga untuk memberikan akses terhadap sumber daya ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin.

Selain itu, pemerintah desa juga mendirikan kelompok-kelompok usaha seperti Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memberikan lapangan kerja serta memperkuat ekonomi lokal. Melalui pendekatan ini, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai penyedia bantuan, tetapi juga sebagai pemberdaya masyarakat. Namun, dalam

pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program yang ditawarkan, keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, serta tantangan dalam mendistribusikan bantuan secara merata.

Pembangunan dan pengentasan kemiskinan adalah dua aspek yang saling berkaitan. Program pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sejatinya diarahkan untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan, seperti akses jalan, pendidikan, dan ekonomi. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa desa yang memiliki pembangunan infrastruktur yang baik cenderung memiliki angka kemiskinan yang lebih rendah, karena masyarakat lebih mudah mengakses layanan dasar dan peluang ekonomi. Sinergi ini penting agar program-program yang dijalankan tidak bersifat jangka pendek atau bersifat konsumtif, melainkan berkelanjutan dan mendorong kemandirian masyarakat.

Dalam konteks teori peran pemerintah (public policy dan governance), hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan tiga peran utama: sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator pembangunan.

- Sebagai regulator, pemerintah menyusun kebijakan dan aturan yang mendukung pengelolaan dana desa.
- Sebagai fasilitator, pemerintah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
- Sebagai katalisator, pemerintah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui program pemberdayaan.

Ketiganya memperkuat posisi pemerintah dalam mendorong pembangunan yang

# SEMINASIA

## (Seminar Nasional Ilmu Admininstrasi)

"Membangun Bangsa Melalui Pembangunan Ekonomi Perdesaan"

inklusif dan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

### Ide Pokok Pembahasan

Subtopik	Ide Pokok
1. Peran Pemerintah dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan Desa	Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat guna mengatasi masalah kemiskinan di desa. Kebijakan ini harus berbasis pada kebutuhan lokal dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
2. Tantangan dan Hambatan dalam Pengentasan Kemiskinan Desa	Pemerintah sering menghadapi hambatan dalam mengatasi kemiskinan desa, seperti keterbatasan anggaran, ketergantungan pada sektor pertanian, serta ketimpangan distribusi sumber daya.

### PENUTUP DAN REKOMENDASI

Sebagai akhir dari penelitian yang telah dilakukan, berikut disampaikan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi masukan konstruktif bagi berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

- a. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat. Melalui pemanfaatan Dana Desa dan pelibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan, pembangunan yang dilakukan cenderung lebih partisipatif dan sesuai kebutuhan lokal.
- b. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah desa berperan aktif melalui program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembentukan lembaga usaha seperti BUMDes dan KWT. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat miskin.
- c. Pengentasan kemiskinan di desa belum optimal meskipun berbagai program telah dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kapasitas sumber daya manusia desa dan rendahnya tingkat kemandirian ekonomi masyarakat.
- d. Faktor pendukung utama keberhasilan program adalah dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan adanya partisipasi tokoh masyarakat. Sedangkan faktor penghambat adalah lemahnya perencanaan program berbasis kebutuhan nyata masyarakat dan budaya ketergantungan warga terhadap bantuan.
- e. Terdapat sinergi yang erat antara pembangunan dan pengentasan kemiskinan, di mana pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi mendukung peningkatan kualitas hidup dan akses ekonomi masyarakat miskin secara langsung.
- f. Meskipun berbagai program telah dijalankan, masih terdapat kendala seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, kurangnya sosialisasi program, dan belum meratanya distribusi

**SEMINASIA**  
**(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)**  
“Membangun Bangsa Melalui Pembangunan Ekonomi Perdesaan”

bantuan yang menghambat efektivitas pengentasan kemiskinan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 2016 - 224.
- BPS. (2024). *Profil Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Chambers, R. (1995). *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?* London: Intermediate Technology Publications.
- Lewis, O. (1961). *The Children of Sanchez: Autobiography of a Mexican Family*. New York: Random House.
- Rostow, W. W. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Todaro, M. (2000). *Economic Development*. 7th Edition. New York: Addison Wesley Longman.
- Townsend, P. (1979). *Poverty in the United Kingdom: A Survey of Household Resources and Standards of Living*. Harmondsworth: Penguin Books.